

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada bidang perekonomian di Indonesia UMKM pada umumnya merupakan alat penggerak dalam bidang ekonomi memiliki banyak sekali peranan penting didalamnya. UMKM berkontribusi tinggi terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Sebanyak 64,2 juta atau 99,99% unit usaha Indonesia adalah UMKM. Rinciannya sebanyak 63,4 juta adalah Usaha Mikro (UMi), 783,1 ribu adalah Usaha Kecil (UK), dan 60,7 ribu Usaha Menengah (Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, 2021).

Dalam pendirian UMKM di Indonesia bagi para pelaku usaha harus memahami landasan hukum tentang kriteria – kriteria yang sudah diatur dalam peraturan – peraturan hukum yang berlaku diantaranya kriteria dalam pendirian UMKM yang diatur dalam UU No 7 tahun 2021 bahwa didalamnya dijelaskan mengenai sumber kekayaan atau aset serta hasil penjualan yang harus dimiliki pelaku usaha dalam satu tahun. Kriteria yang lain dalam pendirian usaha UMKM adalah kriteria dalam pengambilan atau pemilihan jumlah tenaga kerja pada pendirian UMKM untuk mengetahui jumlah tenaga kerja atau karyawan yang dapat mendukung jalannya usaha tersebut.

Unit mikro kecil menengah merupakan sebuah usaha yang mempunyai *owner* yang tidak berbeda. UMKM sendiri dapat dibagi menjadi beberapa unit diantaranya perusahaan manufaktur serta dagang dan entitas dalam bidang jasa (Wuwungan, 2015; Savitri & Saifudin, 2018). Keadaan UMKM dari berbagai jenis tersebut harusnya didukung dengan adanya keinginan serta kemampuan untuk terus dapat mengembangkan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan mereka. Selain itu adanya UMKM sendiri dapat dikatakan

mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran yang ada di negara kita. dikarenakan adanya UMKM mampu menyerap banyak sekali tenaga kerja yang ada di negara kita.

Keterpurukan perekonomian di masa Pandemi di Indonesia saat ini menyebabkan peningkatan pengurangan sejumlah tenaga kerja sehingga bisa dikatakan angka pengangguran yang ada di Indonesiapun meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik 2021, Di indonesia angka pengangguran meningkat 6,26% diantaranya Terdapat 19,10 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid19 dan Terdiri dari pengangguran karena Covid19 1,62 juta, BAK karena Covid19 0,65 juta , angkatan tidak bekerja karena Covid19 sebesar 1,11 juta dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan Jam kerja 15,72 juta. Di masa pendemi saat ini UMKM mempunyai peranan penting untuk pertumbuhan perekonomian dan mampu mengatasi berbagai permasalahan tentang tenaga kerja yaitu pengangguran yang terdampak pandemi dimana pada saat ini. Pada masa pandemi saat ini kita dapat melihat UMKM masih mampu terus bertahan karena para pelaku usaha UMKM sendiri bersandar pada bisnis atau usaha lokal yang dijalannya selama masa krisis pandemi covid 19.

Dalam menjalankan aktivitas usaha pada dasarnya UMKM yang ada di indonesia masih memiliki banyak kendala. Kelemahan yang terjadi pada usaha kecil di Indonesia adalah umumnya pengelola usaha banyak sekali yang belum dan tidak mampu menguasai serta tidak mampu melakukan penerapan sistem keuangan yang memadai. Pengusaha pada unit usaha kecil banyak yang menganggap adanya penerapan sistem keuangan itu tidaklah penting dan membuang waktu serta biaya. (Rosita & Dura, 2018:63). Banyak para pelaku usaha UMKM yang mengelola usahanya atas dasar pemikiran sendiri

tanpa memahami aspek dalam pengelolaan dan pencatatan laporan keuangan mereka. Aspek tersebut merupakan Hal terpenting bagi pengelola usaha kecil untuk membangun dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankan (Mulyani dkk, 2019).

Penerapan pencatatan akuntansi pada UMKM *Laundry* sendiri sangat berbeda pencatatanya dengan perusahaan – perusahaan besar lainnya dimana pada UMKM pencatatan akuntansi yang digunakan hanyalah ketika terjadi kas masuk dan keluar saja. Kebanyakan pelaku usaha lebih mengandalkan ingatannya untuk mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada usaha mereka. *Owner* UMKM masih banyak yang beranggapan bahwa pencatatan keuangan tidak perlu dilakukan karena membutuhkan waktu serta kecermatan dalam pembuatannya maka dari itu kebanyakan *owner* UMKM enggan melakukan pencatatan tersebut (Yulianti dkk, 2019). Pada kenyataanya masih terdapat banyak kendala dalam penyusunan atau pencatatan akuntansi pada UMKM itu sendiri yaitu pelaku usaha UMKM kebanyakan tidak pernah melakukan pencatatan dengan benar mereka hanya mengandalkan perkiraan saja dalam pencatatan akuntansi pada usaha mereka. Padahal untuk mengelola keuangan dengann baik adalah dengan mlakukan pencatatan menggunakan penerapan akuntansi didalamnya dengan melakukan pencatatan atau perhitungan menggunakan sistem akuntansi yang layeak sesuai yang telah dianjurkan dengan begitu pengelola usaha dapat mengetahui posisi laporan keuangan mereka. (Warsono, 2010; Mulyani dkk, 2019).

Setiap usaha pasti diharapkan mampu memiliki pencatatan laporan keuangan yang dicatat tidak hanya perhitungan selisih kas masuk dan keluar saja. Pencatatan yang benar seharusnya para pelaku UMKM juga melakukan

pencatatan lengkap sesuai dengan (SAK) EMKM yang ada pada pencatatan akuntansi pada UMKM guna Untuk dapat memberikan informasi tentang aktivitas keuangan yang ada pada usaha yang sedang dijalankannya sehingga mampu melakukan pembuatan keputusan – keputusan ekonomi serta mampu mempertanggung jawabkan asset yang mereka pakai dalam mengelola usaha maka dari itu pencatatan akuntansi mampu memberikan informasi keuangannya untuk pelaku UMKM (Arifin dkk, 2012; Savitri & Saifudin, 2018).

Dalam melakukan penyusunan pencatatan akuntansi sendiri harus disusun berdasarkan dengan SAK EMKM yang merupakan adanya bentuk peningkatan kualitas dalam pembuatan laporan keuangan serta dapat menjangkau sebuah manfaat yang baik dalam sebuah peningkatan kualitas pembuatan laporan keuangan yang telah dibuat pada usaha yang sedang dijalankan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2018, SAK EMKM merupakan sebuah perusahaan atau usaha jasa dengan akuntabilitas publik yang dominan dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam undang – undang tentang UMKM yang ada di Indonesia. Laporan Keuangan entitas sendiri disusun secara akrual sebagaimana digunakan dalam unit mikro kecil dan menengah.

Melihat berbagai kondisi yang dialami oleh pelaku usaha unit mikro kecil menengah di Indonesia, guna dapat membantu adanya berbagai macam kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha pemerintah telah menetapkan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada regulasi yang telah dibuat. Oleh karena itu, pelaku usaha unit mikro kecil dan menengah dapat melakukan penerapan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada saat ini yaitu sesuai dengan SAK EMKM.

Penelitian dalam bidang penerapan pencatatan akuntansi pada UMKM sendiri telah banyak dilakukan. Peneliti – peneliti sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan (Yulianti dkk, 2019) meneliti tentang Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Studi Pada Usaha Kerupuk Kulit Tradisional Sagenteng. Dimana penelitian ini memiliki tujuan adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi dan kendala yang terjadi dalam penelitian yang diteliti. Jenis dan metode penelitian yang diiloh oleh peneliti adalah deskriptif dengan survey pada usaha kerupuk tersebut dengan hasil yang diperoleh ada beberapa kendala yaitu dengan kurangnya pemahaman akan pencatatan laporan keuangan dan menganggap tidak pentingnya melakukan pencatatan.

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Savitri & Saifudin (2018:121), yaitu Pencatatan Akuntansi Pada UMKM Mr. Pelangi Semarang dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pencatatan akuntansi masih belum maksimal karena persepsi suatu komponen yang sangat rumit dilakukan dan dipahami serta jika *owner* memiliki keahlian di bidang akuntansi dapat meningkatkan kinerja serta dapat upah yang ada dalam bisnis yang dijalankan.

Penelitian juga dilakukan oleh Shofwati N (2018) penelitian tentang Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis SAK EMKM (studi pada depo air minum sehat alami “AMSAL”) dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penerapan pencatatan akuntansi dari yang sederhana menjadi pencatatan laporan keuangan yang baik sesuai standar yang berlaku karena pada dasarnya pelaku usaha UMKM yang diteliti hanyalah menggunakan pencatatan sederhana berupa laporan penerimaan dan pengeluaran saja.

Penelitian atau studi mengenai penerapan pencatatan dalam akuntansi UMKM sangat menarik untuk diteliti apalagi dimasa pandemi saat ini karena pada penelitian sebelum – sebelumnya banyak ditemukan penelitian yang menjadi banyak perdebatan yaitu masih banyaknya pelaku usaha UMKM yang masih belum menerapkan pencatatan akuntansi berdasarkan SAK EMKM sesuai anjuran pemerintah dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap pencatatan akuntansi dan masih banyak yang menganggap bahwa membuat atau menerapkan pencatatan akuntansi dalam usaha mereka merupakan hal yang rumit dan sulit. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat “Penerapan Pencatatan Akuntansi usaha mikri kecil menengah Berbasis SAK EMKM Dimasa Pandemi Pada Usaha Jasa *Laundry* Di Sidoarjo (Studi Pasa Ismail Barokah *Laundry*) yang memiliki tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi UMKM pada usaha jasa Ismail Barokah *Laundry*.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah dapat mengetahui latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas secara rinci, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pencatatan akuntansi dengan berbasis SAK EMKM di Ismail Barokah *Laundry*?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi pada usaha jasa Ismail Barokah *Laundry* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penulisan diatas tentang rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan tentang tujuan penelitian yaitu :

1. Dapat menerapkan pencatatan akuntansi berbasis SAK EMKM pada usaha jasa Ismail Barokah *Laundry*.